



Sinergi & Strategi Jangka Panjang untuk Menata Kawasan Kumuh

TAJUK

Kota Jogja pada 2023 ini akan menata tiga kawasan kumuh dengan anggaran sebanyak Rp2,9 miliar. Tiga kawasan ini semuanya berada di pinggir sungai. Tujuan utamanya adalah mengembalikan ruang publik yang sebelumnya digunakan warga.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja menargetkan penataan kawasan kumuh di Kota Pelajar ini rampung pada November nanti.

Berdasarkan catatan DPUPKP Kota Jogja, total ada sebanyak 146 RT seluas 89,37 hektare kawasan

kumuh yang tersisa di Kota Gudeg pada 2023 ini. Mantrijeron menjadi kementren yang terbesar di angka 15,34 hektare. Pada 2022 lalu luasan kawasan kumuh berkurang sebanyak 4,82 hektare dengan pengurangan terbesar di Tegalejo sebanyak 1,79 hektare.

Penataan kawasan kumuh ini tentu berkorelasi dengan tingkat kesehatan dan kemiskinan warga di Kota Jogja. Kenapa kesehatan? Sebab kawasan kumuh kebanyakan memiliki problem sanitasi buruk.

Kami mendukung langkah Pemkot Jogja yang menata

kawasan kumuh di perkotaan. Tentunya tidak hanya menata, namun mencegah agar kawasan kumuh tidak bertambah di kawasan perkotaan. Apa jadinya jika kawasan kumuh satu sudah dibersihkan, namun di titik lain muncul kawasan kumuh baru.

Bagaimana pun kawasan kumuh akan memunculkan sejumlah problem lain. Selain problem kesehatan, tentu ada problem pendidikan, ekonomi, kriminalitas dan lain sebagainya.

Diperlukan strategi jangka panjang untuk mengatasi kawasan kumuh, terutama

soal penyediaan kawasan permukiman di perkotaan. Lahan di perkotaan jelas semakin terbatas. Jika pun tersedia, harganya sudah tidak terjangkau oleh penduduk kebanyakan. Dan bantaran Sungai bukan lahan yang tepat untuk permukiman.

Oleh karenanya, Pemkot juga perlu merancang model permukiman penduduk di perkotaan. Rusunawa misalnya, perlu disediakan lebih banyak menyamping dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Jogja.

Menurut kami, diperlukan adanya akselerasi penataan kawasan kumuh. APBD

Kota Jogja tentu tidak bisa menjawab kebutuhan ini. Oleh karenanya, perlu koordinasi dan pembagian porsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda DIY. Toh, Kota Jogja adalah ibu kota Provinsi DIY. Dan kota ini juga lah aset utama daya tarik pariwisata yang dapat mendatangkan efek domino perekonomian ke seluruh kabupaten di wilayah DIY.

Penataan kawasan kumuh ini juga tidak bisa dibatasi dengan wilayah administratif. Sebab kawasan perkotaan selalu tumbuh membesar. Ada Sleman dan Bantul yang masuk dalam wilayah aglomerasi perkotaan.

Kedua kabupaten juga mesti memberi kepedulian yang sama dalam problem ini.

Di Bantul misalnya, masih ada 295 hektare kawasan kumuh yang tersebar di 14 kapanewon.

Diperlukan sinkronisasi program penataan kawasan kumuh di ketiga daerah. Apalagi ada benang penghubung dalam persoalan ini yakni sungai.

Semua sungai di Kota Jogja berhulu di Sleman, dan hilirnya ada di Bantul. Sehingga kawasan kumuh bantaran Sungai semestinya diselesaikan secara bersama-sama oleh ketiga wilayah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005